

**DAMPAK PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE TERHADAP MASYARAKAT LOKAL BATU LUMBANG DI DESA PEMOGAN, KOTA DENPASAR**Ashr Putramadya Tirta<sup>a,1</sup>, I Nyoman Sunarta<sup>a,2</sup> I Gede Gian Saputra<sup>a,3</sup><sup>1</sup>[ddthirta@gmail.com](mailto:ddthirta@gmail.com), <sup>2</sup>[nyoman\\_sunarta@unud.ac.id](mailto:nyoman_sunarta@unud.ac.id), <sup>3</sup>[igedegiansaputra@unud.ac.id](mailto:igedegiansaputra@unud.ac.id)<sup>a</sup> Program Studi Pariwisata Program Sarjana, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Jl. Sri Ratu Mahendradatta Bukit Jimbaran, Badung, Bali**Abstract**

*The development of Batu Lumbang Mangrove Ecotourism in Pemogan Village, South Denpasar, is a community-based effort aimed at preserving the environment while improving the welfare of the local community. This area, which was previously quiet and unproductive, has now become an eco-friendly tourist destination with main activities such as mangrove tours, environmental education, and conservation. This phenomenon is worth studying because, in addition to its economic impacts, it also generates social dynamics within the community that can be analyzed using Doxey's Theory (1975). This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. Informants consist of managers, local communities, and other related parties. The data obtained is analyzed by linking field findings to the concepts of ecotourism development, community participation, and Doxey's theory up to the annoyance stage. The results of the study show that the development of ecotourism has been taking place gradually since 2005, involving the fishing community as the main actors. Based on Doxey's theory, the Batu Lumbang community has gone through stages ranging from euphoria to apathy to early signs of annoyance, particularly in relation to the issue of waste carried by the river and limited human resources. Nevertheless, the relationship between the community and tourists remains positive thanks to the efforts of the managers in providing opportunities for participation through discussion forums and training. From an economic perspective, this ecotourism initiative has increased income, created jobs, and promoted equitable distribution of benefits, while maintaining environmental sustainability through the concept of limited tourism.*

**Keywords:** Ecotourism, Mangroves, Socio-Economic, Community Participation, Sustainable Tourism

**I. PENDAHULUAN**

Ekowisata merupakan salah satu bentuk pariwisata yang berkembang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama di kawasan pesisir dan ekosistem *Mangrove*. Hutan *Mangrove* sendiri memiliki fungsi ekologis yang sangat penting bagi keseimbangan lingkungan. Selain melindungi garis pantai dari abrasi, *Mangrove* juga berperan sebagai penyerap karbon, penyaring alami limbah, dan menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna. Seperti dijelaskan oleh Saenger (1981) dalam Anwar et al. (1984), ekosistem *Mangrove* memiliki fungsi biologis yang tinggi karena menjadi tempat hidup larva, ikan muda, hewan produktif, dan tempat bersarang burung-burung besar.

Namun, nilai *Mangrove* tidak hanya terletak pada fungsi ekologisnya. Kawasan ini juga memiliki nilai estetika, edukasi, serta potensi besar untuk dikembangkan menjadi ekowisata berbasis konservasi lingkungan. Salah satu kawasan yang tengah berkembang dalam hal ini adalah Ekowisata *Mangrove* Batu Lumbang. Wilayah ekowisata mulai dilihat sebagai salah satu strategi yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu mendukung kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Menurut Sunarta dan Arida (2017), ekowisata bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan ekonomi masyarakat lokal. Harapannya, masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi dari lingkungan, akan turut serta menjaga dan

melestarikannya. Hal inilah yang juga terjadi di Batu Lumbang, di mana masyarakat yang sebelumnya bergantung pada hasil laut, kini mulai memiliki penghasilan tambahan dari aktivitas wisata seperti menjadi pemandu, operator perahu, hingga menjual makanan dan suvenir.

Bali sendiri merupakan provinsi dengan karakteristik ekonomi yang unik, di mana sektor pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Sektor-sektor lain, seperti perikanan atau pertanian, lebih berperan sebagai pendukung (Margareni, 2016). Maka dari itu, pengembangan ekowisata seperti di Batu Lumbang menjadi penting, karena sejalan dengan arah pembangunan Bali yang mengutamakan sektor wisata, namun tetap bisa berlandaskan pada pelestarian alam.

Namun dibalik berbagai peluang tersebut, muncul juga berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Interaksi yang semakin intens antara wisatawan dan masyarakat lokal bisa memunculkan perubahan sosial. Masyarakat yang tadinya hidup sederhana bisa terdorong mengikuti gaya hidup modern, yang secara perlahan dapat memengaruhi nilai-nilai dan budaya tradisional. Selain itu, jika pengelolaan tidak adil, bisa muncul konflik sosial atau perebutan akses terhadap sumber ekonomi. Isu lingkungan juga menjadi perhatian penting. Tanpa perencanaan dan pengelolaan yang baik, aktivitas wisata bisa menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran, kerusakan habitat *Mangrove*, hingga

terganggunya populasi satwa liar. Oleh karena itu, pendekatan ekowisata yang benar-benar berkelanjutan menjadi kunci. Pariwisata yang berkelanjutan seharusnya tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tapi juga adil secara sosial dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan (Sunarta dan Arida, 2017).

Suwarsih (2018) juga menegaskan bahwa sumber daya pesisir, termasuk *Mangrove*, memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi masyarakat melalui sektor seperti perikanan, kehutanan, hingga pariwisata. Dalam konteks Batu Lumbang, penting untuk melihat bagaimana pengembangan ekowisata *Mangrove* benar-benar berdampak terhadap masyarakat lokal, terutama dalam hal sosial dan ekonomi. Merujuk pada Mursyid dkk. (2022), penelitian seperti ini sangat dibutuhkan untuk memahami secara lebih dalam bagaimana ekowisata memengaruhi dinamika masyarakat lokal—baik dari sisi tantangan maupun peluangnya. Hal ini penting agar strategi pengelolaan yang dibuat ke depan bisa lebih inklusif, tepat sasaran, dan benar-benar mendukung kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana proses Pengembangan Ekowisata *Mangrove* Batu Lumbang serta sejauh mana dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal yang berada di sekitarnya. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi dari sisi fisik dan ekonomi semata, tetapi juga untuk memahami dinamika sosial yang timbul akibat aktivitas pariwisata berbasis ekologi tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai arah pengembangan kawasan wisata ini, termasuk bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan, distribusi manfaat, dan tantangan yang dihadapi.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk dilakukan saat ini. Kajian ini tidak hanya mengukur dampak fisik dan ekonomi, tetapi juga memetakan dinamika sosial, tingkat keterlibatan masyarakat, distribusi manfaat, serta tantangan yang dihadapi. Hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi pengelola, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan arah pengembangan Ekowisata *Mangrove* Batu Lumbang yang berkelanjutan, berbasis partisipasi masyarakat, dan selaras dengan prinsip konservasi lingkungan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Ekowisata *Mangrove* Batu Lumbang, Desa Pemogan, Denpasar, Provinsi Bali. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu kawasan ekowisata berbasis komunitas

yang sedang berkembang dan memberikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan memahami secara mendalam dinamika pengembangan ekowisata dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan ditentukan dengan purposive sampling, yang melibatkan pengelola ekowisata, masyarakat lokal, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Data dianalisis secara interaktif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis hasil penelitian mengacu pada Teori Doxey's Irridex (1975) untuk menelaah dinamika sikap masyarakat terhadap perkembangan ekowisata, serta dikaitkan dengan konsep partisipasi masyarakat dan pariwisata berkelanjutan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Ekowisata *Mangrove* Batu Lumbang

Ekowisata *Mangrove* Batu Lumbang merupakan destinasi wisata berbasis lingkungan yang terletak di wilayah pesisir dengan kekayaan ekosistem *Mangrove* yang masih alami. Kawasan ini dikembangkan sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat lokal melalui kegiatan wisata berkelanjutan. Di kawasan ini, pengunjung dapat menikmati keindahan hutan *Mangrove* melalui jalur tracking, susur sungai dengan perahu, serta berbagai aktivitas edukatif yang mengenalkan pentingnya fungsi ekologis *Mangrove* bagi kehidupan pesisir. Selain menawarkan pengalaman alam yang khas, ekowisata ini juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui pelibatan mereka sebagai pemandu wisata dimana di ekowisata mangrove batu lumbang terdapat 7 orang pemandu lokal, penyedia kuliner lokal, dan produk kerajinan berbahan dasar alam. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan ini mencerminkan sinergi antara konservasi dan kesejahteraan sosial. Ekowisata *Mangrove* Batu Lumbang tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga contoh nyata dari model pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berbasis komunitas.

Daya tarik utama (*Attraction*) dari kawasan ini adalah kegiatan susur hutan mangrove menggunakan kano yang memungkinkan pengunjung menikmati keindahan dan keasrian ekosistem mangrove secara langsung. Jalur susur air yang tenang sepanjang kurang lebih 500 meter memberikan pengalaman wisata yang edukatif dan menyenangkan. Pengunjung juga dapat melihat langsung berbagai jenis vegetasi mangrove, mendengar suara alami burung, serta berinteraksi dengan masyarakat lokal yang aktif menjaga kawasan ini melalui edukasi dan konservasi. Tidak hanya itu, keunikan spot foto

seperti lorong akar mangrove dan papan edukasi lingkungan menjadikan tempat ini sangat menarik, terutama bagi wisatawan muda yang mencari pengalaman otentik dan konten visual yang menarik.

### Fasilitas Kano Dan Perahu



(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024)

Untuk menyusuri jalur-jalur air di sekitar hutan *Mangrove*, disediakan layanan penyewaan perahu dengan harga sewa Rp. 30.000,00/perahu untuk wisatawan lokal dan Rp. 50.000,00/perahu untuk wisatawan mancanegara dengan kapasitas 2 orang yang memungkinkan para wisatawan menikmati pemandangan dari perspektif yang berbeda dengan nyaman dan teratur.

Dari sisi aksesibilitas (*Accessibility*), Ekowisata Mangrove Batu Lumbang cukup mudah dijangkau karena hanya berjarak sekitar 20 menit dari pusat Kota Denpasar. Akses jalan menuju lokasi sudah beraspal, namun belum tersedia angkutan umum langsung sehingga mayoritas pengunjung menggunakan kendaraan pribadi atau layanan transportasi online. Meskipun demikian, penunjuk arah menuju lokasi masih terbatas sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam hal navigasi digital dan papan petunjuk fisik.

Untuk fasilitas penunjang (*Amenities*), destinasi ini sudah memiliki dermaga kecil tempat naik-turun kano, alat keselamatan seperti pelampung, serta beberapa fasilitas dasar seperti toilet dan warung UMKM yang menjual makanan dan minuman ringan. Di sekitar area juga tersedia papan edukasi tentang manfaat hutan mangrove dan tempat duduk sederhana untuk pengunjung bersantai. Sejak tahun 2024, pengelola juga mulai menerapkan sistem pemesanan berbasis digital menggunakan QR code untuk meningkatkan efisiensi dan pencatatan pengunjung. Sementara itu, dari sisi layanan pendukung (*Ancillary*), pengelolaan kawasan ini dilakukan oleh komunitas lokal melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dengan dukungan dari pihak eksternal seperti PLN Indonesia Power melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Selain itu, terdapat dukungan dari Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup, serta

beberapa organisasi lingkungan yang turut serta dalam pelatihan, pendampingan, dan promosi. Pemandu lokal yang terlatih juga tersedia untuk memberikan informasi dan edukasi langsung kepada pengunjung mengenai pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Dengan kolaborasi ini, Ekowisata Mangrove Batu Lumbang menjadi salah satu contoh pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan konservasi yang mulai tumbuh dengan pendekatan berkelanjutan.

### Sejarah Ekowisata Mangrove Batu Lumbang

Pada awalnya, kawasan yang kini dikenal sebagai Ekowisata Mangrove Batu Lumbang memiliki nama Prapat Benoa, merujuk pada banyaknya tumbuhan prapat yang tumbuh di daerah tersebut. Berdasarkan informasi dari narasumber, pada tahun 1970-an, wilayah ini masih berupa kawasan hutan mangrove alami yang belum banyak tersentuh oleh aktivitas manusia. Memasuki tahun 1980-an, pemerintah mulai bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memanfaatkan lahan mangrove melalui sistem budidaya tambak yang dikenal sebagai sistem tumpangsari, yaitu pengelolaan lahan yang menggabungkan antara pelestarian mangrove dan budidaya tambak secara berdampingan.

### Dermaga Ekowisata Mangrove Batu Lumbang



(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Namun, seiring dengan perkembangan sektor pariwisata dan meningkatnya permintaan terhadap hasil perikanan, khususnya udang dan ikan, mulai banyak investor asing terutama dari Tiongkok (China) yang masuk ke wilayah ini untuk mengembangkan usaha tambak komersial. Akibatnya, sistem tumpangsari yang sebelumnya masih memperhatikan keberadaan vegetasi mangrove berubah menjadi sistem tambak total yang menyebabkan terjadinya pembabatan besar-besaran terhadap hutan mangrove di kawasan Batu Lumbang. Konversi lahan mangrove menjadi tambak secara masif ini berdampak pada degradasi ekosistem pesisir yang cukup signifikan.



Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, pada tahun 1992, pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang secara tegas melarang kegiatan tambak intensif di kawasan tersebut dan mendorong upaya pemulihan lingkungan. Sejak saat itu, mulai dilakukan program reboisasi dan rehabilitasi mangrove yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Upaya ini terus berlanjut hingga saat ini dan menjadi landasan awal lahirnya inisiatif pengembangan kawasan Batu Lumbang sebagai destinasi ekowisata berbasis konservasi. Peralihan dari kawasan eks tambak menjadi kawasan wisata alam edukatif ini menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mengembalikan fungsi ekologis kawasan sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan bagi warga sekitar. Dukungan dari pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah (LSM) semakin menguatkan kesadaran ini berupa investor-investor asing yang juga turut mendukung. Pada pertengahan tahun 2000-an, mulai dilakukan inisiatif-inisiatif konservasi seperti penanaman kembali pohon *Mangrove* dan kampanye edukasi lingkungan. melihat potensi keindahan alam dan nilai edukatif yang dimiliki kawasan *Mangrove* Batu Lumbang, muncul ide untuk mengembangkan daerah ini sebagai destinasi ekowisata. Pemerintah lokal bersama dengan komunitas masyarakat dan dukungan LSM mulai merancang konsep ekowisata yang berbasis estetika dan keberlanjutan. Inisiatif ini bertujuan tidak hanya untuk melestarikan lingkungan tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui pariwisata.

### Dinamika Pengembangan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang

Pengembangan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang merupakan hasil inisiatif masyarakat nelayan setempat yang dimulai sejak tahun 2005. Upaya ini lahir dari kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan sekaligus kebutuhan akan alternatif penghidupan. Seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi daya tarik wisata berbasis komunitas dengan aktivitas utama berupa susur *mangrove* menggunakan kano, edukasi lingkungan, serta penyediaan jasa makanan dan suvenir oleh warga lokal.

Untuk memahami dinamika sosial dalam pengembangan kawasan ini, teori *Irritation Index* dari George Doxey (1975) digunakan sebagai kerangka analisis. Namun, penting untuk dipahami bahwa teori ini tidak selalu menggambarkan urutan pasti yang harus dialami setiap komunitas wisata. Dalam konteks Batu Lumbang, teori ini hanya digunakan sebagai alat bantu untuk memahami perbedaan sikap masyarakat terhadap kehadiran wisatawan dan perubahan sosial yang terjadi.

Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi pada masa awal pengembangan karena adanya peluang ekonomi baru dan dukungan dari pihak luar seperti pemerintah dan LSM. Semangat gotong royong tercermin dalam pembangunan fasilitas dasar, pelatihan pemandu wisata, serta perbaikan akses menuju kawasan.

Interaksi lebih banyak terjadi melalui transaksi jasa dan aktivitas wisata. saat ini mulai terlihat adanya perubahan sikap masyarakat yang mengarah pada tahap annoyance atau kejengkelan ringan, sebagaimana dijelaskan dalam teori Irritation Index oleh Doxey. Hal ini bukan disebabkan oleh perilaku wisatawan secara langsung, melainkan lebih pada dampak tidak langsung dari aktivitas wisata, seperti meningkatnya beban pengelolaan sampah yang berasal dari aliran sungai, serta tekanan terhadap kapasitas pengelolaan kawasan oleh komunitas lokal yang sumber dayanya terbatas.

### Masyarakat Rutin Mengumpulkan Sampah



(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Meski demikian, tidak ditemukan indikasi kuat adanya kejengkelan atau penolakan masyarakat terhadap aktivitas wisata. Tantangan seperti masalah sampah dari sungai, keterbatasan SDM, dan pengelolaan yang belum maksimal memang diakui, namun masyarakat cenderung meresponsnya secara positif melalui inisiatif kolektif. Namun pengelola tetap berusaha menjaga kawasan secara konsisten. Oleh karena itu, pengembangan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang menunjukkan proses yang dinamis dan adaptif, dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mewujudkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

### A. Munculnya Rasa Terganggu Oleh Dampak Lingkungan

Mulai dirasakannya gangguan terhadap lingkungan, terutama yang bersumber dari

sampah kiriman. Berdasarkan wawancara dengan pengelola, diketahui bahwa kawasan mangrove sering menerima limbah sampah dari dua sungai besar, yaitu Tukad Badung dan Tukad Mati. Hal ini terutama terjadi saat musim hujan, ketika volume air meningkat dan membawa sampah rumah tangga serta limbah lainnya langsung ke jalur susur mangrove yang digunakan wisatawan. Wayan Pasek, salah satu pengelola, menyatakan bahwa, sampah setiap hari selalu bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola telah melakukan upaya maksimal dalam menjaga kebersihan kawasan, namun permasalahan lingkungan dari luar kawasan tetap menjadi beban berat yang dirasakan terus-menerus. Situasi ini tidak hanya mengganggu estetika kawasan wisata, tetapi juga menimbulkan kelelahan psikologis dan fisik bagi masyarakat yang bertugas menjaga kawasan.

#### **B. Kelelahan Pengelola dan Beban Kerja yang Meningkat**

Muncul beban kerja berlebih dan kejenuhan pada kelompok pengelola akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Sebagian besar pengelola berasal dari latar belakang sebagai nelayan yang sebelumnya tidak memiliki keahlian khusus dalam pelayanan wisata, manajemen pengunjung, maupun promosi digital. Ketika kawasan mulai dikenal dan wisatawan datang dengan ekspektasi tertentu terhadap layanan, para pengelola merasa terbebani karena harus menyesuaikan diri dengan tuntutan tersebut tanpa dukungan pelatihan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara harapan wisatawan dengan kemampuan aktual pengelola, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan tekanan psikologis serta risiko menurunnya kualitas pelayanan.

#### **C. Keterbatasan Partisipasi Masyarakat Luas**

Keterbatasan partisipasi masyarakat luas dalam pengelolaan wisata juga menjadi salah satu penyebab lahirnya potensi kejengkelan. Sebagaimana ditemukan dalam hasil wawancara sebelumnya, sebagian warga yang tidak tergabung dalam kelompok pengelola merasa bahwa mereka tidak secara langsung merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan wisata. Hal ini berpotensi menimbulkan perasaan eksklusivitas dan ketimpangan distribusi manfaat, yang meskipun belum melahirkan konflik, namun bisa mengurangi semangat kebersamaan dan gotong royong yang semula kuat pada fase awal pengembangan. Dalam Teori Doxey, situasi ini menjadi salah satu indikator penting bahwa

masyarakat mulai mengalami pergeseran sikap terhadap wisatawan dan kegiatan wisata itu sendiri, dari yang semula antusias, menjadi pasif, lalu perlahan menuju sikap kritis.

#### **D. Meningkatnya Kekhawatiran Terhadap Kapasitas Lingkungan dan Daya Dukung Kawasan**

Meningkatnya kekhawatiran terhadap kapasitas lingkungan dan daya dukung kawasan menjadi sinyal tambahan bahwa masyarakat mulai memasuki fase kewaspadaan terhadap dampak wisata. Meskipun *MoU* antara pengelola dan Dinas Kehutanan telah mengatur bahwa wisata dilakukan secara terbatas untuk menjaga kelestarian, masyarakat tetap khawatir jika pengunjung semakin banyak, maka kerusakan lingkungan akan sulit dihindari. Kekhawatiran ini menunjukkan bahwa meskipun secara ekonomi ekowisata membawa manfaat, namun secara ekologis dan sosial mulai timbul tekanan yang perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi penolakan.

### **Dampak Ekowisata Mangrove Terhadap Masyarakat Lokal Di Batu Lumbang**

#### **A. Dampak Terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal**

Pengembangan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat lokal, khususnya bagi para nelayan yang tergabung dalam kelompok pengelola. Sebelum adanya pengembangan kawasan ini sebagai destinasi ekowisata, sebagian besar masyarakat menggantungkan pendapatannya semata-mata dari aktivitas melaut. Pendapatan tersebut bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh faktor musim, cuaca, serta ketersediaan sumber daya laut. Rata-rata pendapatan harian nelayan pada masa itu hanya berkisar sekitar Rp 75.000 per hari, yang sering kali tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, terutama di musim paceklik.

Namun, setelah kawasan ini dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis konservasi, terjadi perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang cukup nyata. Masyarakat mulai memperoleh penghasilan tambahan dari berbagai aktivitas yang berkaitan langsung dengan pariwisata, seperti pemandu wisata susur mangrove, penyewaan kano, pengelolaan kebersihan kawasan, serta kegiatan edukatif dan konservasi bagi wisatawan. Rata-rata pendapatan harian yang sebelumnya hanya Rp 75.000, kini meningkat menjadi sekitar

Rp 300.000 per hari setelah terlibat dalam kegiatan ekowisata. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan pendapatan hingga empat kali lipat dibandingkan kondisi sebelumnya.

Perbedaan ini menjadi indikator utama adanya dampak ekonomi, di mana kondisi setelah adanya ekowisata (penghasilan dari sektor wisata dan perikanan) menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya (penghasilan hanya dari sektor perikanan). Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, diketahui bahwa sebagian besar tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan wisata berasal dari warga lokal, termasuk anak-anak dari keluarga nelayan. Mereka dilibatkan dalam aktivitas operasional sehari-hari, seperti membantu tamu, mengatur logistik, hingga menjaga kebersihan kawasan. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh keluarga secara keseluruhan.

Meskipun jumlah penghasilannya belum tergolong besar secara agregat dan belum menyumbang langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan tahunan dari pengelolaan ekowisata ini telah mencapai lebih dari Rp 300 juta, yang menjadi kontribusi signifikan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat sekitar. Masyarakat kini memiliki sumber pemasukan yang lebih stabil dan tidak hanya bergantung pada laut. Selain itu, hasil tangkapan nelayan juga memiliki potensi pasar baru melalui rencana pengembangan wisata kuliner berbasis hasil laut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak pengembangan ekowisata terhadap pendapatan masyarakat lokal terlihat dari adanya selisih kondisi ekonomi sebelum dan sesudah pengelolaan kawasan sebagai destinasi wisata. Selisih ini merupakan bentuk konkret dari dampak ekonomi yang positif. Tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperluas peluang ekonomi masyarakat lokal secara lebih berkelanjutan.

## B. Dampak Terhadap Penciptaan Peluang Lapangan Kerja

Pengembangan Ekowisata *Mangrove* Batu Lumbang telah memberikan dampak nyata terhadap penciptaan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, terutama bagi anggota kelompok nelayan yang sebelumnya hanya mengandalkan aktivitas melaut sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Sebelum adanya ekowisata, masyarakat sekitar memiliki ruang

kerja yang terbatas dan bersifat musiman, serta sangat tergantung pada kondisi alam dan cuaca. Namun setelah kawasan ini dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis lingkungan, muncul berbagai jenis pekerjaan baru yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah pengembangan ekowisata menunjukkan adanya peningkatan jumlah dan variasi jenis pekerjaan yang tersedia. Jika sebelumnya nelayan hanya fokus pada penangkapan ikan, kini mereka juga dilibatkan dalam berbagai aktivitas pariwisata seperti penyewaan kano, pelayanan wisata susur *Mangrove*, pengelolaan sampah, hingga peran sebagai edukator lingkungan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini merupakan bentuk konkret dari dampak positif pengembangan ekowisata terhadap dunia kerja lokal.

Selain menyerap tenaga kerja dari kalangan orang tua, keberadaan ekowisata juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan produktif yang relevan dengan isu keberlanjutan. Anak-anak dari keluarga nelayan mulai terlibat dalam operasional wisata, seperti membantu tamu, menjaga kebersihan kawasan, serta mempelajari keterampilan baru yang berkaitan dengan ekowisata. Keterlibatan lintas generasi ini menjadi indikasi bahwa ekowisata mampu menciptakan ekosistem kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

### Anak Salah Satu Masyarakat lokal yang juga bekerja di Ekowisata Mangrove Batu Lumbang



(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Pengembangan lapangan kerja ini dihadapkan pada tantangan utama, yaitu rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Sebagian besar nelayan yang kini turut mengelola kawasan wisata berada pada usia lanjut dan tidak memiliki latar belakang keterampilan di bidang



pariwisata, seperti pelayanan tamu, manajemen wisata, dan komunikasi publik. Kondisi ini menjadi hambatan dalam optimalisasi potensi ekonomi dari ekowisata.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Pariwisata telah memfasilitasi pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan secara berkala. Materi pelatihan meliputi pelayanan wisata, pengelolaan lingkungan, hingga promosi wisata berbasis media sosial. Pelatihan ini telah diikuti oleh para pengelola ekowisata dan menjadi strategi penting dalam penguatan kompetensi tenaga kerja lokal agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan dinamika sektor pariwisata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak pengembangan ekowisata terhadap lapangan kerja tercermin dari adanya selisih kondisi antara sebelum dan sesudah pengelolaan wisata. Sebelumnya, peluang kerja masyarakat terbatas pada sektor perikanan, sementara setelah adanya ekowisata, jenis pekerjaan menjadi lebih beragam dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa ekowisata memiliki potensi besar dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi ke depan.

### C. Dampak Ekowisata Terhadap Pemerataan Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat

Pengembangan Ekowisata *Mangrove* Batu Lumbang memberikan dampak signifikan terhadap pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, khususnya komunitas nelayan yang tergabung dalam kelompok pengelola. Sebelum ekowisata dikembangkan, pendapatan masyarakat sangat bergantung pada hasil laut yang bersifat musiman dan tidak menentu. Selain itu, hanya sedikit pihak yang mendapatkan keuntungan ekonomi secara langsung, mengingat keterbatasan jenis usaha dan peluang kerja yang tersedia di kawasan pesisir ini. Namun, setelah adanya pengelolaan ekowisata yang berbasis masyarakat, terjadi pergeseran kondisi ekonomi yang cukup terlihat. Keuntungan dari aktivitas wisata, seperti penyewaan perahu, jasa pemandu, dan pengelolaan kawasan, kini dapat dinikmati secara langsung oleh para anggota kelompok nelayan dan keluarganya. Selisih antara sebelum dan sesudah pengelolaan ekowisata mencerminkan adanya pemerataan manfaat yang lebih adil, karena ekonomi lokal tidak lagi terpusat pada aktivitas perikanan saja, melainkan

terbagi dalam sektor-sektor baru yang mendukung ekowisata.

Sistem distribusi keuntungan yang diterapkan oleh kelompok pengelola bersifat tertutup dan kolektif, di mana hanya anggota resmi kelompok yang dapat menerima bagian dari pendapatan. Sistem ini sengaja dibentuk untuk menjamin keberpihakan kepada nelayan tradisional yang selama ini berperan aktif dalam menjaga kelestarian kawasan *Mangrove*. Hal ini menjadi salah satu bentuk konkret dari pengendalian internal terhadap siapa yang berhak menikmati hasil dari ekowisata, sekaligus mencegah masuknya pihak-pihak luar yang berpotensi membawa tekanan komersialisasi berlebihan.

Berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana manfaat ekonomi hanya dirasakan oleh segelintir pihak atau tidak merata, kini pendapatan dari sektor wisata dibagi secara sistematis kepada anggota komunitas pengelola. Dampak ini menunjukkan bahwa setelah adanya ekowisata, masyarakat lokal memiliki kontrol lebih besar terhadap sumber daya dan hasil ekonomi yang dihasilkan dari lingkungan mereka sendiri. Skema ini juga membantu meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, pembatasan pengelolaan dalam skala terbatas juga didasarkan pada perjanjian formal berupa *Memorandum of Understanding (MoU)* antara kelompok pengelola dengan Dinas Kehutanan dan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. Dalam *MoU* tersebut ditegaskan bahwa aktivitas ekowisata harus tetap mempertimbangkan kapasitas daya dukung lingkungan dan prinsip konservasi. Dengan demikian, distribusi manfaat tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga selaras dengan keberlanjutan ekologis kawasan. Secara keseluruhan, perbedaan kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah adanya ekowisata mencerminkan adanya dampak positif berupa pemerataan manfaat yang lebih terarah, berkeadilan, dan berbasis komunitas. Sistem yang dibangun juga mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan, yang menjadi tujuan utama dari ekowisata berbasis keberlanjutan.

### D. Dampak Terhadap Kepemilikan Dan Pengelolaan Ekonomi Masyarakat Lokal

Sebelum adanya pengembangan Ekowisata *Mangrove* di Batu Lumbang, masyarakat lokal

hususnya nelayan, hanya memanfaatkan kawasan *Mangrove* untuk kegiatan melaut atau mengambil hasil alam tanpa sistem pengelolaan yang terorganisir. Mereka belum memiliki hak kelola secara formal dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kawasan tersebut. Semua kebijakan dan pengaturan kawasan sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjadi pengguna pasif. Setelah pengelolaan ekowisata resmi dimulai pada tahun 2005 dan diperkuat melalui kerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Tahura Ngurah Rai, peran masyarakat lokal mulai berubah. Kini masyarakat, khususnya kelompok nelayan, tidak hanya terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari seperti menyambut wisatawan dan menjaga kebersihan kawasan, tetapi juga memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola destinasi ekowisata ini. Mereka juga terlibat dalam pengambilan keputusan penting melalui rapat atau forum diskusi yang dilakukan secara rutin.

#### Beberapa Piagam Penghargaan untuk Masyarakat Lokal Dalam Mengelola Ekowisata Mangrove Batu Lumbang



(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Dampaknya, masyarakat yang sebelumnya hanya bergantung pada hasil laut kini juga memiliki tanggung jawab dan kesempatan dalam mengelola kawasan wisata. Dengan sistem yang partisipatif, setiap keputusan penting biasanya dibahas bersama melalui diskusi tahunan yang melibatkan banyak pihak. Dengan adanya sistem seperti ini, masyarakat merasa memiliki kawasan *Mangrove* tersebut. Mereka bisa ikut menentukan arah pengembangan wisata dan menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Selain itu, legalitas kelompok pengelola juga membantu mereka dalam menjalin kerja sama dengan berbagai

pihak dan memperoleh pelatihan dari instansi terkait.

Perbedaan yang paling terlihat sebelum dan sesudah adanya ekowisata adalah kini masyarakat tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pengelola yang memiliki suara dan tanggung jawab penuh. Hal ini tentu mendorong pemberdayaan masyarakat lokal secara nyata, di mana mereka diberi ruang untuk berperan aktif dalam menjaga dan mengembangkan potensi yang ada di wilayah mereka. Dengan kata lain, kehadiran ekowisata *Mangrove* di Batu Lumbang telah memberikan dampak positif terhadap penguatan posisi masyarakat dalam pengelolaan ekonomi lokal, serta meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan sekitar.

#### E. Dampak Terhadap Pengembangan Ekowisata *Mangrove* Batu Lumbang

Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan Bahasa Bali, seperti mencanangkan Bulan Bahasa Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018. Kegiatan ini diisi dengan berbagai lomba dan festival dari tingkat desa hingga provinsi, termasuk lomba nyurat lontar, komik daring, dan meme berbasis bahasa Bali. Selain itu, pelestarian Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali juga didukung melalui Pesta Kesenian Bali (PKB), yang merupakan kegiatan tahunan sejak 1979. PKB menjadi strategi penting dalam membina dan mengembangkan seni budaya Bali serta memperkuat identitas masyarakat Bali. Dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pesta Kesenian Bali, PKB telah terbukti memberikan dampak positif terhadap pelestarian budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Ekowisata *Mangrove* Batu Lumbang telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, terutama setelah kawasan ini mulai dikelola secara formal sejak tahun 2005 dan diperluas melalui pembaruan *MoU* pada tahun 2022. Sebelum dikelola menjadi kawasan ekowisata, wilayah *Mangrove* ini belum memiliki fungsi wisata yang terarah. Tidak ada aktivitas susur *Mangrove*, jalur wisata, fasilitas edukatif, ataupun bentuk kegiatan konservasi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kawasan hanya dikenal sebagai hutan *Mangrove* biasa, bahkan sebagian areanya sering menjadi tempat pembuangan sampah karena tidak dikelola secara optimal.



Setelah dijadikan ekowisata, terjadi perubahan nyata dalam hal pengembangan kawasan. Kini telah tersedia jalur susur *Mangrove* yang dirancang khusus untuk wisatawan, meskipun masih sederhana. Kegiatan wisata pun berkembang menjadi lebih beragam, seperti edukasi lingkungan, konservasi *Mangrove*, dan pelayanan wisata susur menggunakan kano. Fasilitas dasar seperti dermaga kecil, papan informasi, dan tempat duduk mulai dibangun dengan dukungan CSR dari pihak swasta. Selain itu, pengelola juga merencanakan pengembangan rumah singgah dan wisata kuliner berbasis hasil laut lokal, sebagai bentuk diversifikasi produk wisata yang tetap berlandaskan konservasi.

Dampak lainnya terlihat dari peningkatan signifikan jumlah kunjungan wisatawan setelah pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, khususnya pada tahun 2019, kunjungan wisatawan ke Ekowisata Mangrove Batu Lumbang hanya berkisar  $\pm 1.500$ – $1.800$  orang per tahun, didominasi oleh wisatawan lokal dan kelompok edukasi sekolah. Pada periode 2020–2022, kawasan ini ditutup sepenuhnya akibat pembatasan sosial, sehingga tidak ada aktivitas wisata sama sekali. Setelah dibuka kembali pada 15 November 2023, jumlah kunjungan mulai meningkat meskipun tanpa promosi besar-besaran, yakni mencapai  $\pm 800$  orang hanya dalam waktu satu setengah bulan. Peningkatan ini berlanjut pesat pada tahun 2024 dengan total 21.770 kunjungan, dan hingga bulan Juli 2025 sudah tercatat 10.581 kunjungan.

Dengan menerapkan konsep wisata terbatas, pengelolaan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan kelestarian lingkungan. Pembatasan jumlah pengunjung yang telah disepakati dalam MoU bersama Dinas Kehutanan dan Tahura Ngurah Rai bertujuan untuk mencegah kerusakan ekosistem akibat aktivitas berlebihan, bukan untuk mengurangi minat wisatawan. Hasilnya, kawasan yang dulunya tidak terurus kini berkembang menjadi destinasi ramah lingkungan yang dikelola langsung oleh masyarakat, menawarkan aktivitas seperti susur mangrove, edukasi lingkungan, dan usaha lokal berbasis hasil laut. Perubahan ini tidak hanya memberikan dampak positif secara ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan peluang kerja, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian mangrove sebagai aset berharga desa.

Dengan kata lain, dampak pengembangan Ekowisata *Mangrove* Batu Lumbang bisa dilihat dari perbedaan kondisi sebelum dan sesudah kawasan ini dikelola sebagai tempat wisata. Kawasan yang dulunya tidak terawat kini menjadi tempat yang bermanfaat, ramah lingkungan, dan mendukung pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Sebelum adanya ekowisata, masyarakat khususnya nelayan hanya bergantung pada hasil laut yang bersifat musiman dan tidak menentu. Lapangan kerja terbatas, manfaat ekonomi belum merata, serta masyarakat belum memiliki peran dalam pengelolaan kawasan.

Namun, setelah kawasan dikelola sebagai ekowisata berbasis masyarakat, terjadi peningkatan pendapatan, munculnya beragam pekerjaan baru seperti pemandu wisata dan pengelola kano, serta pemerataan manfaat ekonomi dalam kelompok nelayan. Selain itu, masyarakat kini memiliki hak kelola formal dan dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kawasan yang dulunya tidak terawat kini lebih tertata, menarik, dan produktif, sekaligus memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

#### IV. KESIMPULAN Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang telah berlangsung secara bertahap dan melibatkan masyarakat lokal secara langsung sejak awal. Proses ini menggambarkan dinamika sosial yang selaras dengan Teori Doxey (1975), dimulai dari tahap *Euphoria*, di mana masyarakat menyambut wisatawan dengan antusias dan semangat gotong royong. Seiring waktu, muncul fase *apathy*, ketika beberapa warga mulai menganggap kehadiran wisatawan sebagai hal biasa dan tidak lagi menunjukkan keterlibatan aktif, khususnya mereka yang tidak tergabung dalam kelompok pengelola. Memasuki tahap *annoyance*, mulai terasa adanya beban dan gangguan, seperti persoalan sampah kiriman dari dua sungai besar serta keterbatasan kemampuan dalam menghadapi perkembangan wisata. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa hubungan masyarakat dengan wisatawan tetap kondusif hingga tahap ini, hubungan antara masyarakat dan wisatawan tetap berjalan

kondusif karena pengelola terus mengupayakan ruang partisipasi melalui forum diskusi dan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas. Secara umum, pengembangan ekowisata di Batu Lumbang masih berada di jalur positif dengan tetap melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaannya.

Sementara itu, dampak ekowisata terhadap masyarakat lokal terlihat cukup jelas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kehadiran kawasan wisata berbasis Mangrove ini telah membuka peluang penghasilan baru di luar sektor perikanan, seperti menjadi pemandu wisata, penyedia kano, hingga pengelola kebersihan dan konservasi. Anak-anak nelayan pun ikut terlibat, memperkuat semangat kolaborasi lintas generasi. Meski sistem pembagian hasil bersifat tertutup untuk menjaga keberpihakan kepada kelompok nelayan, manfaatnya terasa cukup merata di kalangan anggota komunitas. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan juga meningkat, karena mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasan. Dengan demikian, ekowisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi alat pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang selaras dengan prinsip pariwisata berkelanjutan.

### **Saran**

Bagi pengelola Ekowisata Mangrove, penting untuk terus memperluas keterlibatan masyarakat, termasuk mereka yang belum tergabung dalam kelompok inti, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata. Pengelola juga disarankan meningkatkan kemampuan promosi dan pelayanan wisata melalui pelatihan digital marketing, manajemen kawasan, serta pengembangan produk wisata baru seperti edukasi lingkungan, kuliner hasil laut, dan wisata terbatas berbasis konservasi. Langkah ini akan memperkuat posisi Ekowisata Batu Lumbang sebagai daya tarik wisata berbasis komunitas yang adaptif dan berkelanjutan.

Bagi pihak pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan Provinsi Bali, diharapkan dapat memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan Ekowisata Mangrove Batu Lumbang melalui program pelatihan peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan kelompok pengelola, serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, papan informasi, dan fasilitas wisata ramah lingkungan. Pemerintah juga perlu memfasilitasi kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjaga prinsip konservasi dan keberlanjutan, khususnya dalam menghadapi

persoalan lingkungan seperti sampah kiriman dari hulu sungai.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali lebih dalam aspek daya dukung lingkungan dan efektivitas sistem pengelolaan berbasis masyarakat dalam jangka panjang. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan ke dimensi budaya, persepsi wisatawan, atau kajian komparatif dengan ekowisata berbasis komunitas lainnya di Bali agar pengembangan di Batu Lumbang dapat terus berinovasi dan menjadi model inspiratif untuk daerah lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andereck, K. L., Valentine, K. M., Knopf, R. C., & Vogt, C. A. (2005). *Residents' perceptions of community tourism impacts*. *Annals of Tourism Research*, 32(4), 1056–1076.
- Angela, V. F. (2023). Strategi Pengembangan Ekowisata dalam Mendukung Konservasi Alam Danau Tahai. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 984-993.
- Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Buckley, R. (2009). *Ecotourism: Principles and practices*.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Ceballos-Lascurain, H. (1987). *The future of ecotourism*. Mexico: Pronatura.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation and evaluation*.
- Doxey, G. V. (1975). *A causation theory of visitor-resident irritants: Methodology and research inferences*. In *Proceedings of the Travel Research Association Sixth Annual Conference*. San Diego, California.
- Durkheim, E. (1982). *The Rules of Sociological Method* (S. Lukes, Ed.; W.D. Halls, Trans.). New York: The Free Press. (Original work published 1895)
- Durkheim, E. (2014). *The Division of Labor in Society* (W.D. Halls, Trans.). New York: Free Press. (Original work published 1893)
- Ecotourism: *Principle, Practices, and Policies for Sustainability*. (1990).
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Berbasis Masyarakat: Sebuah Pendekatan Konseptual*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hermawan, H. (2016a). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105–117.
- Hobley, M. (1996). *Participatory forestry: The process of change in India and Nepal*.
- Irwan. (2018). *Analisis Dampak Lingkungan: Perspektif Biofisik dan Sosial Budaya*.
- Latutuapraya, F. (2020). *Studi Potensi Ekosistem Mangrove sebagai Ekowisata Berbasis Estetika dan Edukasi di Negeri Wailulu Kecamatan Seram Utara Barat* (Doctoral dissertation, IAIN Ambon).
- Lumanauw, N., & Benazira, A. (2023). Potensi Ekowisata *Mangrove* Batu Lumbang sebagai Destinasi Wisata di Tahura Bali. *Jurnal Akademi Pariwisata Medan*, 11(2), 36-46.
- Margareni, N. P. A. P., Djayastra, I. K., & Yasa, I. G. W. M. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal PIRAMIDA*, 12(1), 101-110.
- Mason, P. (2016). *Tourism Impacts, Planning and Management (3rd ed.)*. Routledge.
- Mujaffar, A. (2020). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa*.
- Mulyadi, A., & Hamidy, R. (2021). *Development of Mangrove Ecotourism in Bandar Bakau Dumai Based on Disaster Mitigation*. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 16(7).
- Mulyanto Sumardi, & Hans Dieter Evers. (2001). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali.
- Murniati, N., & Suparman, S. (2020). *Analisis Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 407–416.
- Mursyid, H., Aji, K. B., Panuntun, M. D., Ihsan, M. A. F., & Pinem, M. L. (2022). Urgensi Pelestarian Ekosistem Lingkungan Fisik Pada Destinasi Wisata: Pengalaman dari Kawasan Ekowisata Hutan *Mangrove* Batu Lumbang, Denpasar, Bali. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) Vol*, 9(1), 451-477.
- Paturusi, S. A. (2001). *Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pariwisata, Materi Kuliah Perencanaan Kawasan Pariwisata*. Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, Bali.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pynanjung, P. A. (2018). Dampak pengembangan ekowisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang: Studi kasus kawasan ekowisata Riam Pangar. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 10(1), 22-38.



- Saenger, P., Hegerl, E. J., & Vie, J. D. S. D. A. (1983). Global Status of *Mangrove Ecosystems*. The Environmentalist, 3(Supplement), 88.
- Safwan, S. B. (2022). *Analisis Dampak Pariwisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Objek Wisata Waduk Brayeun di Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Saputra, I. G. G. (2020). Studi pelibatan masyarakat lokal dalam pengemasan produk Desa Wisata Catur Kintamani Bali. *Jurnal Kepariwisata*, 19(2), 77–86.
- Saputra, I. G. G. (2021). Bentuk digitalisasi desa wisata di masa normal baru: Studi kasus Desa Sayan Ubud Bali. *Jurnal Kepariwisata*, 20(1), 1–10.
- Sharpley, R. (2014). *Tourism and Development: Concepts and Issues* (2nd ed.). Channel View Publications.
- Spillane, J. J. (1987). *Pariwisata Indonesia: Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno & Retnoningsih. (2017). Pengaruh dan Dampak dalam Perspektif Psikologi Sosial.
- Sunarta, N., & Arida, N. S. (2017). *Pariwisata Berkelanjutan*. Denpasar: Cakra Press & Universitas Udayana.
- Sunarta, I. N., & Arida, I. N. S. (2020). *Membangun pariwisata dari desa: Kearifan lokal dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata*. Prosiding Seminar Nasional Tata Ruang dan SPACE, 200–210.
- Suriaatmadja, S. (1997). Aspek Lingkungan dalam Pengembangan Pariwisata. Dalam Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Berbasis Masyarakat: Sebuah Pendekatan Konseptual*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susianti, H. W., Dianasari, D. A. M. L., & Saputra, I. G. G. (2022). Penguatan storytelling produk desa wisata Bakas Kabupaten Klungkung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Makardhi*, 1(3), 202–210.
- Suwarsih. (2018). Pemanfaatan Ekologi dan Ekonomi dari Program Rehabilitasi *Mangrove* di Kawasan Pesisir Pantai Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. *Jurnal Techno-fish* Vol 2(1), 12–18
- Wahyundaria, D. A. & Sunarta, N., (2020). Identifikasi Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Lingkungan di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *JURNAL DESTINASI PARIWISATA*.
- Widyatmaja, I. K. (2017). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larisan.
- Yoeti. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. PT ANGKASA.
- Zilfana, Z. (2021). Analisis Strategi SWOT dalam Pengembangan Potensi Ekowisata di Kalimantan Timur. *Aktual*, 6(2), 11–20.

**Sumber lain:**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata